

NOTULA
Trilateral Meeting (TM)
OPEN GOVERNMENT INDONESIA (OGI)

I. Pelaksanaan Kegiatan

Hari, Tanggal : Selasa, 22 September 2020
Pukul : 09.00 – 11.00 WIB
Tempat : Zoom Meeting Room
Agenda : Pembahasan Matriks Target Capaian
Pemimpin Rapat : Kepala Sekretariat Nasional OGI
Peserta : 1. Perwakilan LKPP
2. Perwakilan KIP
3. Perwakilan Dit. SPPEPP Bappenas
4. Perwakilan Dit. Polkom Bappenas
5. Tim Sekretariat Nasional OGI

II. Diskusi

1. Perwakilan Indonesia Corruption Watch memberikan paparan terkait usulan matriks target capaian rencana aksi Keterbukaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa.
 - a. Pada dasarnya target capaian tidak banyak berubah. Hanya ada penambahan berdasarkan rapat pembahasan terakhir.
2. Perwakilan dari Komisi Informasi Pusat menyatakan beberapa poin tentang keterbukaan informasi.
 - a. Terkait Ukuran Keberhasilan “Diterbitkannya revisi PERKI SLIP yang salah satu bagiannya mengatur keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa”, KIP sudah mengeluarkan Surat Edaran nomor 2 tahun 2020 yang berlaku untuk semua badan publik.
3. Perwakilan dari LKPP menyampaikan beberapa poin sebagai berikut.
 - a. Terkait Ukuran Keberhasilan “Diterbitkannya Surat Edaran Bersama antara LKPP, KIP, dan Kementerian Dalam Negeri untuk Pemerintah Daerah,” sudah ada SE LKPP nomor 20 tahun 2020

terkait pencatatan pengadaan dalam kondisi darurat yang juga sudah disosialisasikan melalui LPSE.

- b. Selain itu, kegiatan “Menginformasikan Standar Informasi Publik di Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (menguatkan Perki SLIP) dan Himbauan untuk menginput pelaksanaan pengadaan darurat terkait Covid-19 ke dalam SPSE Terpusat” sudah bisa menggunakan SK PPID LKPP no 1 terkait DIP dan SKPPID no 2 terkait DIK sebagai landasan aturan.
 - c. Empat indikator terkait penyampaian informasi sudah tidak relevan.
4. Bapak Fadli Arif selaku Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP menjelaskan beberapa hal terkait Pengadaan Darurat.
- a. Ruang Lingkup Kontrak perlu dipertegas karena kontrak mengacu pada seluruh proses pengadaan barang dan jasa hingga selesai. Oleh karena itu perlu standarisasi, informasi apa yang ingin ditampilkan.
 - b. Terkait **SPSE Terpusat**, LKPP sudah memiliki sistem terpusat, jadi tidak perlu menjadi indikator.
 - c. Satu indikator yang perlu dicantumkan adalah “Menyiapkan sistem informasi yang dapat mengintegrasikan data dan kemudian dapat diakses oleh publik.”

III. Tindak Lanjut

1. Rapat selanjutnya akan diadakan untuk menajamkan target capaian.

IV. Dokumentasi

